

## DPRD Banjarmasin: Cermati Data Penerima Bantuan Sosial



*Anggota DPRD Kota Banjarmasin Arufah Arif.*

Sumber gambar:

[https://img.antaranews.com/cache/730x487/2022/04/07/IMG\\_20220406\\_200444.jpg.webp](https://img.antaranews.com/cache/730x487/2022/04/07/IMG_20220406_200444.jpg.webp)

Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Arufah Arif meminta pemerintah kota setempat mencermati data penerima bantuan sosial (Bansos) agar betul-betul tepat sasaran. Menurut Arufah di Banjarmasin, Rabu, sering diinformasikan masyarakat saat melaksanakan reses atau menyerap aspirasi terjun langsung ke masyarakat, ada penerima Bansos yang sebenarnya tidak berhak lagi.

"Jadi kami minta cermati lagi data penerima Bansos ini, karena banyak juga diinformasikan masyarakat yang sebenarnya berhak malah belum dapat," ujar Arufah yang duduk di komisi IV tersebut. Pihaknya pun sudah menyinggung hal ini saat rapat dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin, di mana data usulan tambahan penerima Bansos tahun ini yang jumlahnya sekitar 4 ribu ke pemerintah pusat harus dicermati lagi agar jangan sampai ada warga miskin tertinggal. "Kami pun menawarkan untuk membantu jika diperlukan untuk mencermati data penerima Bansos ini, karena kami sering turun ke daerah pemilihan, bisa menanyakan kemasyarakatan kondisi ekonomi penerima Bansos saat ini," papar politisi PPP tersebut.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristiano menyatakan, tahun ini memang diusulkan lagi tambahan penerima Bansos di kota ini ke

pemerintah pusat, jumlahnya sekitar 4 ribu. Tepatnya, kata dia, usulan untuk dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masuk dalam DTKS tidak serta merta langsung mendapatkan Bansos. Tetapi, terang dia, apabila sudah masuk dalam DTKS maka memudahkan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk menentukan program yang cocok dan tepat dalam pengentasan atau penanggulangan kemiskinan. "Terkait misalnya ada penerima Bansos yang ternyata ekonomi sudah naik, kita tidak bisa serta merta mencabutnya, karena itu jadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos, baik menghapus, menurunkan tingkatannya," kata Iwan.

Pastinya, kata dia, akan ada evaluasi data penerima Bansos tersebut dari pemerintah pusat, di mana data akan bisa diperbaharui. Menurut dia, penerima Bansos di Kota Banjarmasin naik hingga menjadi 70 ribu kepala keluarga (KK), baik dari pemerintah kota, provinsi dan pusat. "Kalau tahun 2021 itu yang menerima manfaat bantuan sosial itu sekitar 40 ribu KK, tahun ini naik hingga menjadi 70 ribu KK," ucapnya.

Menurut dia, naiknya sekitar 30 ribu KK tahun ini sebagai penerima manfaat Jaminan Kesejahteraan Sosial (JKS) dinamakan untuk bantuan sosial ini, baik pada Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan BPJS kesehatan. "Tapi harus dipahami, naiknya ini bukan berarti warga miskin di Kota Banjarmasin naik," ucap Iwan. Tapi, tutur dia, ada bantuan sosial dari pemerintah pusat itu diperluas sarannya, seperti dimasukkannya data penerima bantuan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) yang Rp300 ribu perbulannya. "Jadi begini, data-data bantuan pemerintah pusat dari berbagai kementerian untuk masyarakat Kota Banjarmasin baik sosial dan ekonomi itu jadi satu data sekarang sebagai penerima manfaat sosial," tuturnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Arufah Arif meminta pemerintah kota setempat mencermati usulan tambahan sebanyak 4.000 Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan sosial (Bansos) agar betul-betul tepat sasaran.

Menurut Arufah sering diinformasikan masyarakat saat melaksanakan reses atau menyerap aspirasi terjun langsung ke masyarakat, ada penerima Bansos yang sebenarnya tidak berhak lagi.

"Jadi kami minta cermati lagi data penerima Bansos ini, karena banyak juga diinformasikan masyarakat yang sebenarnya berhak malah belum dapat," ujar Arufah yang duduk di Komisi IV dilansir Antara, Rabu, 6 April.

Pihaknya pun sudah menyinggung hal ini saat rapat dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin, di mana data usulan tambahan penerima Bansos tahun ini yang

jumlahnya sekitar 4 ribu ke pemerintah pusat harus dicermati lagi agar jangan sampai ada warga miskin tertinggal.

"Kami pun menawarkan untuk membantu jika diperlukan untuk mencermati data penerima Bansos ini, karena kami sering turun ke daerah pemilihan, bisa menanyakan ke masyarakat kondisi ekonomi penerima Bansos saat ini," papar politisi PPP tersebut.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristiano menyatakan, tahun ini memang diusulkan lagi tambahan penerima Bansos di kota ini ke pemerintah pusat, jumlahnya sekitar 4 ribu.

Tepatnya, kata dia, usulan untuk dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masuk dalam DTKS tidak serta merta langsung mendapatkan Bansos.

Tetapi, terang dia, apabila sudah masuk dalam DTKS maka memudahkan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk menentukan program yang cocok dan tepat dalam pengentasan atau penanggulangan kemiskinan.

"Terkait misalnya ada penerima Bansos yang ternyata ekonomi sudah naik, kita tidak bisa serta merta mencabutnya, karena itu jadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos, baik menghapus, menurunkan tingkatannya," kata Iwan.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/321641/dprd-banjarmasin-cermati-data-penerima-bantuan-sosial>
2. <https://voi.id/berita/154614/dprd-banjarmasin-cermati-usulan-tambahan-4-000-kk-penerima-bansos>

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
  - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - (1) rehabilitasi sosial  
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - (2) perlindungan sosial  
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) pemberdayaan sosial  
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - (4) jaminan sosial  
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - (5) penanggulangan kemiskinan.  
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - (6) penanggulangan bencana  
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.